

PROLOG:

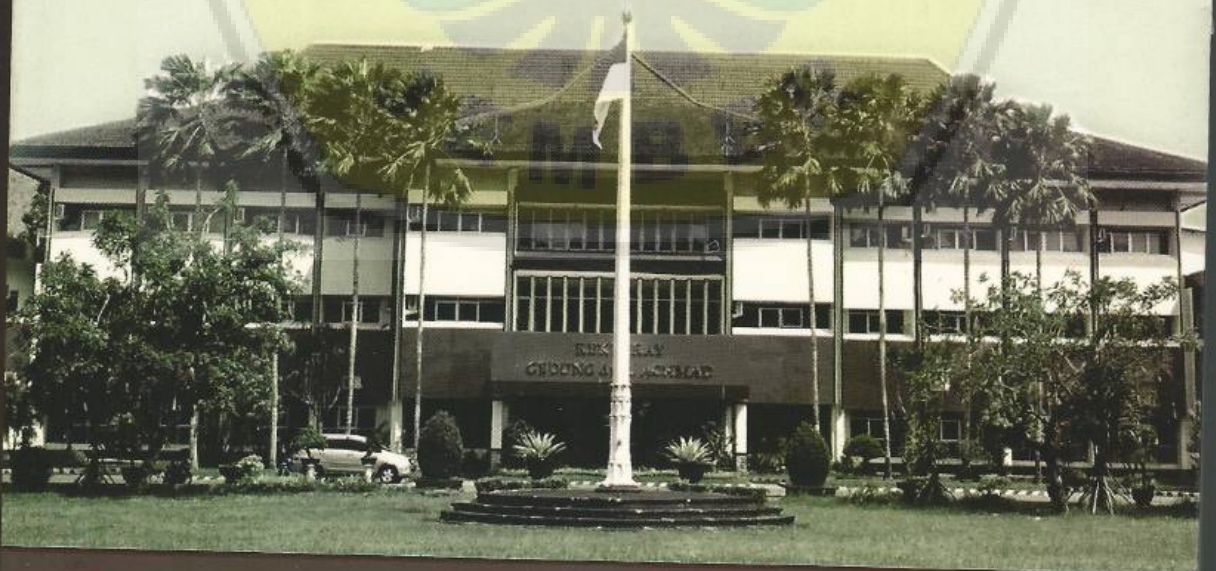
K.H. Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi

EPILOG:

Yudi Latif, Ph.D.

Reaktualisasi Pancasila

Menyoal Identitas, Globalisasi,
dan Diskursus Negara-Bangsa



Editor
Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.
Dr. Alfian Futuhul Hadi, M.Si.
Drs. Anwar, M.Si

DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA DI TENGAH GLOBALISASI: ANTARA EKONOMI KONGLOMERASI DAN EKONOMI RAKYAT

Adhitya Wardhono

Pengantar

Dialektika perilaku konglomerasi di Indonesia menjadi relevan tatka disandingkan dengan semangat mengartikulasikan dinamika ekonomi kerakyatan,terlebih dalam rengkuhan globalisasi. Dalam konteks ekonomi kita hidup di alam yang tidak mengenal batas-batas, tidak ada batas negara yang jelas dan tidak ada batas wilayah bangsa yang jelas. Di sisi lain nilai-nilai ideologis sudah terkonvergensi demikian rupa, artinya ideologi ke depan adalah cenderung bersifat searah dan persaingan antar entitas ekonomi menjelma menjadi semacam ideologi yang universal. Pertarungan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa sebagai pemanda identitas bangsa menjadi semakin samar. Globalisasi menjadi titik pamungkas dari berkelindannya poin-poin di atas. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa hiruk pikuk agen-agen ekonomi akan melintas batas ekonomi dan perekonomian secara masif dan tanpa etika. Ada penampakan secara kuat *interdependency* (saling ketergantungan) antar negara¹. A

¹ Terkait pemaknaan ketergantungan (*interdependency*), kaum ekonomi revisionis merujuk pada dogma Cardoso dan Faletto (1979), bahwasanya ketergantungan ekonomi suatu negara mungkin dapat menjadi titik peluang pemadiran kedepan. Tesis bahwa pemerintah kurang abai terhadap potensi sumberdaya basis yang memiliki faktor endowment tinggi memungkinkan rentabilitas pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil lebih condong p

si kuat dan si lemah dalam konstelasi pasar ekonomi yang selalu ingin menemukan keseimbangan dalam penawaran dan permintaannya Langkah konglomerasi semakin menjadi isu yang jelas berpijak ditengah merananya ekonomi kerakyatan². Dalam konteks pembangunan, nilai-nilai universal tersebut mengiring proses pergerakan ekonomi yang lebih demokratis³.

Meski demikian, perekat yang ada dalam nilai-nilai ideologi lokal masih dapat menjadi pengantar memaknai tranformasi budaya pembangunan ekonomi yang masif dalam diskusi pemerataan dan pertumbuhan dalam kurun waktu dekade terakhir beberengan dengan suasana perekonomian dunia yang sering dirundung resesi⁴. Membaca gerak gerik poin-poin ekonomi diatas maka cacatan kritis dalam tulisan singkat ini akan diawali dengan beberapa pertanyaan mendasar yang dapat diajukan, yaitu: (1) Sejauh mana ide demokrasi ekonomi dan pembangunan ekonomi yang dijalankan selama ini? (2) Apakah wacana ekonomi kerakyatan hadir kembali sebagai reaksi terhadap tatanan ekonomi dunia yang tidak seimbang?(3) Sejauh mana konglomerasi ekonomi yang semakin menggurita dalam arus globalisasi dihadapkan pada formulasi kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan?

Memaknai Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan

Satu kutipan Bung Hatta mengenai konsepsi demokrasi yaitu 'demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung djawab pada rakjat. Dengan tidak ada rasa tanggung djawab, tak mungkin ada

ketergantungan luar negeri. Seiring dengan hal tersebut biasa kesalahan pilihan mode produksi memperburuk situasi perekonomian internal suatu negara

² Globalisasi sebagai sebuah ide menggerus kisi-kisi tatanan ekonomi secara dalam dan lama. Ide globalisasi ini membuncahkan banyak masalah yang gagasannya muncul sejak tahun 1947 ketika GATT dimulai dan b.erdampak pada kemapanan ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga mereka mulai berpikir untuk melakukan ekspansi ke negara berkembang.

³ Jika hal ini tidak diantisipasi dapat menimbulkan gerakan denasionalisasi. Salah satu imbas globalisasi adalah seretnya laju sektor industri (deindustrialisasi) melalui disagregasi pasar industri yang berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan-perusahaan utama ke pada asing (denasionalisasi), lebih detail lihat Prasetyantoko, 2009.

⁴ Konon tema ekonomi yang tidak pernah lekang ditelan jaman adalah krisis ekonomi yang sering terjadi secara mendalam dan terus menerus serta dari sumber yang berbeda-beda. Paling tidak ini tesis dari ekonom Charles P. Kinderberger (lihat lihat Prasetyantoko, 2010)

demokrasi.' (Hatta, 1954:218). Lebih dalam mengadopsi tesis Popper juga menggariskan bahwa demokrasi sering kali dimaknai sebagai bingkai dan ia sendiri tidak dapat memberikan keuntungan kepada warga negara dan memang seharusnya tidak diharapkan demikian. Dalam kenyataannya demokrasi tidak dapat melakukan apapun—hanya warga negara dalam demokrasi yang bisa melakukan (termasuk, tentu saja, yang berada di dalam pemerintahan). Demokrasi hanya menyediakan sebuah kerangka yang didalamnya warga negara mungkin bertindak dalam suatu cara yang kurang lebih terorganisasi dan koheren (Doering, 1999).

Kutipan diatas memiliki makna yang kuat bahwa daulat (ekonomi) ditangan rakyat. Namun demikian tidaklah mudah menjabarkan dengan cermat logika demokrasi dan ekonomi dalam satu persenyawaan istilah yang dapat dimaklumi oleh khalayak. Timbulnya keragaman interpretasi pemaknaan pasti tidak dapat terelakkan. Hakikat pengertian demokrasi ekonomi seringkali dilekatkan pada pengertian kedaulatan rakyat di bidangekonomi. Meskipun pada galibnya istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para cendikiawan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Hal ini dapat dilihat penggunaan istilah, kedaulatan rakyat tersebut dipakai dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Meski demikian, istilah teknis keduanya sama saja, yaitu samasama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bagi bangsa Indonesia, secara konstitusional, ide pertama terkait demokrasi ekonomi tercantum secara eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung ide demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Jadi keseluruhan sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Meski demikian menata konsep demokrasi ekonomi di Indonesia menjadi semakin rumit dan tidak mudah. Kejelasan batasan konsepsional tidak mampu menjadi kerangka yang kuat dalam implementasinya. Penjabaran konsep demokrasi ekonomi dan produk-produk kebijakan pembangunan dalam ruang bernegara di Indonesia sering kali menjauh dari garis konstitusionalnya.

Bisa jadi untuk pertama kalinya, kaitan pembangunan dan demokrasi ekonomi, adalah karena Seymour Martin Lipset yang mengelaborasi studinya dengan bangunan postulat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terbukanya peluang demokratisasi pada masa yang akan datang (Collier, 1979 via Yustika, 2004). Pada titik pemikiran yang lain dapat dijabarkan sebagaimana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandat kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumberdaya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Untuk itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas dalam pemikiran ini. *Pertama*, partisipasi rakyat merupakan unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Intinya peran pemerintah hanyalah sebatas fasilitator, di mana memiliki tanggung jawab penuh memotivasi daya kreasi rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Poin *kedua*, daulat rakyat adalah rasionalitas pilihan terbaik bagi negaranya, baik yang menyangkut tujuannya maupun caranya untuk mencapai tujuan. Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan seyogjanya diarahkan ke pengembangan potensi, insiatif, daya kreasi dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini, pada hakekatnya proses transformasi sosial perlu dipelihara “perimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban dan keadilan dengan cara tertentu yang akan diperkukuh dengan kebebasan manusia dalam masyarakat (Soejadmoko, 1984). Pada konsepsi yang lain Fakih (2001) mempertegas bahwa pembangunan umumnya dipandang sebagai kata benda netral yang diartikan sebagai suatu kata yang digunakan untuk memperjelas proses dan usaha untuk peningkatan kehidupan ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur masyarakat, dan lain sebagainya. Pada aras ini seringkali diksi pembangunan memiliki kepadanan makna dengan perubahan.

Demokrasi dapat menjadi benih yang akan menyemaikan perkembangan ekonomi. Paling tidak dapat ditengarai dari studi Tavares dan Wacziarg, misalnya, mengemukakan, bahwa demokrasi dapat menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pada pendidikan, rendahnya ketimpangan pendapatan dan rendahnya konsumsi pemerintah. Tesis selanjutnya diungkap oleh Amartya Sen

(1999) bahwasannya, demokrasi merupakan prasyarat terpenting untuk bisa melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh. Bagi dia, makna pembangunan tidak lain adalah kebebasan (*development as freedom*). Hal itu baru bisa dicapai bila demokrasi dapat dianut dan diimplementasikan secara sejati (Yustika, 2004). Dalam konsepsi ekonomi pembangunan, seringkali demokrasi dipandang sebagai suatu *meta-institution* atau institusi induk yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya institusi-institusi lain yang berkualitas, dalam arti efektif dan dengan tatakelola atau *governance* yang baik. Paparan lebih lanjut diketengahkan bahwa konsensus yang berkembang mengarah pada kualitas institusi akan memiliki pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan. Intinya institusi yang baik akan, menjadi determinan keberhasilan pembangunan dan demokrasi adalah sistem yang kondusif bagi pengembangan instiusi semacam itu, maka demokrasi menjadi penentu bagi pembangunan ekonomi (Boediono, 2010). Intinya prioritas pertama adalah meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang jelas dan diharapkan mampu menjadi pengerem kemungkinan kegagalan proses berseminya demokrasi. Negara yang berproses dalam jalur demokrasi dan ingin memodernisasi ekonominya pastilah tidak murah. Paling tidak perjalanan panjang dan penuh risiko harus dilalui. Bremmer (2006) dengan gamblang memaparkan risiko demokrasi layaknya kurva-J yaitu kemungkinan terjadi risiko besar ditahap awal namun berangsur menyusut pada tahap-tahap selanjutnya.

Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi

lain (Hamid, 2005). Akhirnya demokrasi harus memiliki kesetiaan tunggal yaitu memastikan kepentingan rakyat (*public concern*) menjadi preferensi publik (*public preference*).

Membaca Konsepsional Ekonomi Rakyat

Membaca konsepsi ekonomi rakyat ala Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsistensi pemikiran Mubyarto, paling tidak menyimak nukilan dalam bukunya bahwa... "*Bangsa Indonesia yang merdeka mewarisi kondisi ekonomi dualistik dan kapitalistik. Disatu pihak perekonomian rakyat lemah dan terbelakang, dan di pihak lain sektor modern yang kuat didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar asing terutama perusahaan-perusahaan milik Belanda*" (Mubyarto, 1995). Pada tataran ini konsepsi ekonomi kerakyatan juga mewacanakan ekonomi Pancasila. Jika menelisik ke belakang, perdebatan Ekonomi Pancasila memiliki 'waktu' yang berbeda dengan Ekonomi Kerakyatan meskipun 'ruangnya' sama yaitu Indonesia. Perbedaan yang mencolok lebih pada kecenderungan bahwa jika konsepsi ekonomi Pancasila dicari 'jati dirinya' dan diberi 'label' sebagai upaya untuk melakukan 'bargaining power' dalam debat wacana peletakan sistem ekonomi Indonesia yang Pancasila tersebut yaitu antara dua sistem ekonomi dunia ekstrem. Artinya pada saat itu berkembang dua kekuatan ekonomi yang besar yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi Pancasila yang diperdebatkan dalam wacana ini lebih pada upaya 'menyusun' tiga aliran besar, kalau digambarkan kira-kira seperti segitiga, yang tiap ujung sudutnya adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Pancasila. Sejatinya sistem ekonomi yang dianut oleh negara adalah seperti pendulum yang dapat ke arah sistem kapitalis atau pada arah sistem sosialis. Yang dimana derajatnya tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara masing-masing⁵. Itu dulu sebelum sistem sosialis runtuh, sekarang konstelasi ekonomi, sosial dan

⁵ Alat ukur ekonomi yang sudah ada justru tersedia untuk mengukur liberalisasi ekonomi dunia, yaitu Index of Economic Freedom (The Heritage Foundation, 1980). Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran individual melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, keuangan, pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buruh. Indeks ini sudah menjadi variabel bebas yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengangguran, dan inflasi. (lihat <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/idei/>).

politik sudah berubah. Dengan runtuhnya dominasi sistem sosial (komunis) memunculkan banyaknya *Übergangländern (countries in transition)* yang juga sedang mencari sistem ekonomi ideal bagi bangsanya. Pengertian sistem ekonomi sendiri dapat diurai sebagai⁶ mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi⁷ mempengaruhi kinerja perekonomian yang dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam wacana sistem ekonomi terkini, salah satu ekonom Jepang, Naniwada (1990) mengatakan, sekarang dunia telah terjadi pergeseran yaitu ekonomi pasar yang merupakan ciri dari sistem kapitalistik menuju sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia yang ada menuju sistem kapitalisme. Namun demikian sistem kapitalisme sendiri juga terjadi paradigma ke arah sistem sosialisme. *Allelomy*, begitu Naniwada menyebut (dari bahasa Yunani: *allelon*=saling tergantung; *nomos*=aturan), dimana pergeseran *mainstream* sistem ekonomi besar menuju satu arah yang mengakibatkan *mix economic*. Disinilah pranata pasar dan pemerintah saling berperan besar⁸. Masih masalah ayunan di pendulum sistem ekonomi, apabila

⁶ Secara definisi sistem ekonomi banyak sekali ekonom yang mencoba mengemukakan. Sistem ekonomi adalah multi dimensional yang terkadang disimplikasikan dalam bentuk fungsi dan variabel-variabel. Stuart and Gregory dalam *Comparative Economic System* memberibatasansistemekonomisebagaiberikut: "Economic system is a set of mechanism and institutions for decision making and for the implementation of decisions concerning production, income, and consumption within a given geographic area."

⁷ Meski penulis sadar seperti yang ditekankan oleh Fredic Pryor bahwa "the concept of an economic system is almost impossible to define exactly." Konsep sistem ekonomi bersifatdinamis, variabel yang dijelaskannya makin kompleks dan karenanya tidak dapatdidefinisikan dengan tepat. Namun demikian beberapa pengertian mendasar sebagai ciriumum tetap diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas paling tidak berangkat dari definisi yang dikonstruksi sejak awal. Suatu sistem ekonomi itu terdiri dari berbagai himpunan konsep dan teori yang terus dikembangkan sesuai dengan keadaan jaman, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjawab berbagai problematika ekonomi yang juga terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

⁸ Hal ini senada dengan yang gagas oleh Lester Thurow, bahwasanya kapitalisme pun mengalami perubahan. Paling tidak merenungkanperkataan Lester Thurowyaitu: "It's still going to be capitalism, but it's going to be a very different capitalism. In other words, we know the forces that are going to determine the future of capitalism. But we don't know isthe exact shape of the future, because that's not determined by

lebih dalam kita cermati apa yang dikemukakan oleh Yoshihara Kanio, yang dengan jelas menuding apa yang berkembang di Asia Tenggara selama ini, termasuk Indonesia, bisa dirasa sebagai kapitalisme malu-malu atau *ersatz capitalism*. Mengatakan bukan kapitalisme, tapi kepemilikan pribadi sangat diagung-agungkan, persaingan bebas pada akhirnya dibiarkan karena tuntutan liberalisasi, juga dibiarkannya korporasi yang main meraksasa dari penumpukan modal yang dilakukan tidak peduli secara bersih maupun rente. Dikatakan malu-malu atau inferior karena campur tangan pemerintah masih terlalu besar dan perkembangan teknologi yang dipunyai tidak memadai⁹.

Di lain pihak berkembang pula dalam dekade terakhir, ekonomi kerakyatan yang dicari konsepnya oleh bangsa Indonesia serupa dengan upaya Keynes dahulu dalam mencari 'resep pemulihan ekonomi' dengan berdasarkan perubahan mendasar pada tataran praxis. Jelasnya karena krisis ekonomi dan bahkan multi dimensi yang tidak kunjung berhenti. Artinya 'pemicu' debat agak berbeda dengan dengan debat ekonomi Pancasila. Kondisi kini adalah terlihat adanya dominasi ekonomi kapitalis/liberal, sebagai wacana tunggal dalam sistem ekonomi dan dipercepat oleh globalisasi ekonomi yang memperkokoh sistem ekonomi tsb: melalui mengguritanya MNC (*multi national company*). Namun sebenarnya dalam kenyataannya ekonomi kapitalis juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam tataran praxis, isyarat Naniwada tersebut dapat kita lihat, jika kita melihat secara komprehensif. Ekonomi tidak berdiri sendiri, ia selalu bersinggungan dengan wilayah non ekonomi, seperti perilaku masyarakat melalui banyak aspek. Yang kita lihat pada sistem kapitalisme itu sendiri secara 'sadar' atau 'tidak sadar' mengadopsi elemen-elemen konstruktif dari paham yang dianut oleh sistem ekonomi sosialisme. Demikian pula sebaliknya, sehingga seperti ada konvergensi didalam gerakannya.

Sistem ekonomi yang dianut negara Federal Jerman adalah salah

stars; it's determined by whatwe do".

⁹ Meski sebenarnya paham kapitalisme ternyata tidak menuai keberhasilan dalamprakteknya.Jikakitacermatitulisn Hernando de Soto dalam bukunya *The Mystery of Capital: why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* sempat mengkritisi, mengapa paham kapitalisme begitu berhasil di Negara barat ternyata gagal total di Negara sedang berkembang.

satu contoh keberhasilan sinyalemen diatas. Jerman berhasil menerapkan ekonomi pasar sosial. Mirip apa yang ingin dicari oleh bangsa Indonesia dengan Ekonomi Pancasila-nya. Dengan begitu apa yang ingin diharap dari Ekonomi Pancasila sendiri, tidak jauh dari ekonomi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsepsi seperti yang dijabarkan oleh Prof. Mubyarto. Jargon ini tentunya sangat beralasan sepanjang demokrasi yang dibangun adalah demokrasi sosial Indonesia. Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Pancasila, ada persamaan yang tidak dapat dipisahkan. Argumentasi yang banyak muncul adalah ekonomi Kerakyatan adalah berpijak pada pilar-pilar Pancasila, sehingga hal inilah korelasinya tidak dapat dipisahkan Bahkan Prof. Mubyarto mengatakan Ekonomi Kerakyatan adalah bagian dari ekonomi Pancasila. Ia juga yakin bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat; sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Ekonomi Kerakyatan lebih pada semangat dan kesadaran atas keadaan yang sedang terjadi. Kata 'rakyat' merupakan representasi konsepsi politis, sehingga 'benar' kecenderungan diarahkan pada rakyat kebanyakan (*common people*). Atau mungkin lebih jelasnya bukan penduduk yang masuk wilayah administratif. Dengan begitu yang ingin 'diraih' adalah rakyat menjadi subyek kegiatan ekonomi, melalui apa yang disebut kebijakan atau strategi memperkuat ekonomi rakyat. Meskipun rakyat tidak kebanyakan pun harus menjadi 'perhatian'.

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ada dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari Sistem Ekonomi Pancasila (Hamid, 2006).Seringkali memikirkan wacana sistem ekonomi Pancasila mengedepankan keadilan dan moral adalah dengan seksama

perlu disematkan dalam konteks implementasinya.¹⁰ Menindaklanjuti penjabaran konsepsi ini bahwa berdasarkan penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu dapat diketahui bahwa ayat 1, 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Konsep tegasnya adalah sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang dengan cermat dan tegas menekankan pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan dengan itu, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, setiap masyarakat tidak dapat hanya diposisikan sebagai objek namun subjek perekonomian, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelenggaraan perekonomian, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses perekonomian tersebut (Baswir, 2001).

Dalam praktiknya ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila melekat nilai-nilai moralistik, demokratik, dan mandiri, sangat mudah ditemukan di lapangan. Aksi ekonomi Pancasila sering terlihat kasat mata di hampir pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang menggerakkan roda ekonomi keluarga dan masyarakat bawah dengan penuh kesadaran. Data dapat sedikit menunjukkan bahwa secara nominal aplikasi Ekonomi Pancasila sesungguhnya melekat pada perilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Pangsa pasar terbesar ekonomi yang diusahakan rakyat kecil dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat dominan. Sisanya dalam jumlah kecil dikuasai oleh pengusaha besar/konglomerasi. Meski demikian, dalam ekonomi kerakyatan semua orang boleh berusaha dan cara bersaingnya sudah wajar, adil, jujur dan *fair*, dan ada yang berhenti sama sekali, ada yang maju sangat banyak, dan maju menjadi raksasa dan konglomerat. Diantara semua pengusaha/pelaku ekonomi terbentuk dalam satu mosaik dalam

¹⁰ Sampai saat ini konsep keadilan yang mapan dan sering dirujuk selalu mengacu kepada teori keadilan John Rawls yang bertolak dari dua prinsip: (i) setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*), yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain; dan (ii) ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya: (a) diekspektasikan secara logis (*reasonably expected*) menguntungkan bagi setiap orang; dan (b) diharapkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak (Rawls, 1999:53).

skala dan besarnya usaha dari yang gurem, seperti pedagang asongan dan pedagang kaki lima, pengusaha kecil, menengah hingga yang raksasa dan konglomerat. Mosaik ini dinamis. Yang gurem bisa tumbuh dan yang besar bisa menyusut dan hancur. Jadi ekonomi kerakyatan akan menghasilkan mosaik tersebut. Karena sistem ekonomi Pancasila juga berasaskan kekeluargaan, maka sesama anggota diharapkan tidak tega jika ada yang tersungkur dalam usahanya. Diharapkan ada perlindungan, yang tertinggal didorong melalui logika gotong royong dengan instrumen yang memungkinkan (Gie, 1998). Lebih jauh di ketengahkan bahwa di Indonesia instrumen itu sudah jelas dalam tataran regulasi berupa UU Koperasi, UU Antimonopoli dan UU Usaha Kecil. Program kerjapun sudah banyak digulirkan, misal saja IDT, KUK, KMKP, program kemitraan dan lain-lain. Regulasi tersebut diatas seringkali menjadi kajian menarik tatkala dipertentangkan dengan eksistensi prinsip-prinsip ekonomi. Terkait hal tersebut, Abimanyu (2000) berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan hendaknya sama sekali jangan dipertentangkan karena sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi. Pada akhirnya yang dicita-citakan bersama adalah membangun ekonomi yang bisa mandiri, tangguh, dan profesional tanpa subsidi. Dalam waktu kedepan mengingat situasi ekonom tidak memungkinkan pemerintah perlu melindungi golongan-golongan lemah dan tertinggal. Namun yang perlu dipastikan adalah subsidi dan perlakuan khusus harus dilengkapi dengan *sunset clause*, yaitu pasal yang menyebutkan sampai dimana dan kapan perlakuan khusus dan subsidi tersebut harus dihentikan, untuk menghindar dari perangkap kebijakan-kebijakan yang bersifat populis. Intinya di bidang ekonomi diperlukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dibidang sosial-politik diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban, antara kebebasan dan keteraturan dan keseimbangan individu dan kolektif dan antara material dan spiritual (Waluyo, 1979).

Serupa tapi tak sama, sebenarnya adalah Adam Smith yang pertama kali memperkenalkan bagaimana ilmu ekonomi bergulir, meskipun beliau lebih dikenal sebagai filosof ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari karya-karya yang muncul sebelum *Wealth of Nations* (1776), yang terkenal itu. *Theory of Moral Statements* (1759) adalah karya yang mendahului sebagai fondasi ilmu ekonomi, yang dengan jelas berpijak pada suatu

moral science yang disusun dan dikembangkan untuk peka kepada masalah keadilan khususnya "keadilan sosial". Bahkan Smith mengatakan bahwa *human conduct* diaktualisasikan dalam 6 motif yaitu: *self-love, sympathy, the desire to be free, sense of propriety, a habit of labor, and the propensity to barter and exchange one thing for another*. Ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Adam Smith ini kemudian dikenal dengan *kelompok Klasik*. Tapi gara-gara krisis juga ternyata teori Adam Smith ini mengalami revisi. Depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu J.M. Keynes dengan bukunya, *General Theory of Employment, Interest and Money* yang kemudian menjadi dasar perkembangan *teori ekonomi makro*. Jika kelompok Klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Lebih jauh menjabarkan pemikiran Keynes ini, peranan negara digunakan memaksa mekanisme pasar untuk bekerja secara efektif. Intervensi negara harus dilihat dari efektifitasnya. Diasumsikan bahwa dalam keadaan mencari bentuk, pemerintah wajib melakukan intervensi pada swasta, khususnya dalam menyediakan infrastuktur. Dan sebaliknya pada saat swasta telah mampu mandiri maka negara dengan kesadarannya harus melepas kaitannya dengan swasta. Tentu saja setelah biaya tetap rata-rata turun berbarengan dengan biaya marjinal privat yang sepadan dengan keinginan membayar dari masyarakat maka negara harus segera mengurangi campur tangannya atau bahkan menghentikannya. Fungsi negara hanya sebagai fasilitator saja. Namun peranan yang tidak utuh dan berlebihan oleh negara, ternyata memaksakan unsur politik masuk dalam unsur pasar. Yang terjadi adalah tidak pernah ada pasar yang sebenarnya. Lihat saja masih rancunya dominasi ekonomi dunia dengan kutub-kutub ekonomi yang ada.

Kembali pada wacana ekonomi kerakyatan, Mubyarto (2002) menekankan bahwa ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, orang kecil, wong cilik, yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Dalam aras literatur ekonomi pembangunan, seringkali juga disebut sebagai sektor informal, "*underground economy*".

atau "extralegal sector". Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian masyarakat tetapi oleh seluruh masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (Mubyarto, 2002). Mengambil simpulan sementara, Salim (1966) dalam tulisannya mengurai bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak sektas sistem ekonomi Etatism, tidak pula seliberal ala Amerika Serikat. Ia adalah kebebasan dengan tanggung jawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat yang adil dan makmur atas landasan demokrasi ekonomi.

Konglomerasi: Dalam Rentang Globalisasi dan Kebijakan Ekonomi

Konsepsi Globalisasi

Globalisasi telah menjadi *icon* banyak masalah dewasa ini. Ia jelas mengarus ibarat gelombang radio yang menerpa tubuh kita meskipun ia tak nampak. Ia berproses begitu cepat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Memahami konsepsi globalisasi tidak saja menarik pada tingkat debat pihak yang pesimis (anti globalisasi) dan optimis (pendukung globalisasi)¹¹, namun kajian globalisasi menarik disimak pada aspek praksis maupun teori-paradigmatis¹². Seperti banyak orangbiasa memandang konsepsi globalisasi memang bukan semata dominasi "political-economy point of view", ia juga semakin relevan dalam kajian "cultural pointof view"¹³. Intinya globalisasi adalah pro-kontra terbesar kali ini.

¹¹ Lihat sepak-terjang "gerakan kiri baru" (*new-left movement*) pada konferensi G8 baru lalu. Demonstrasi yang dipertontonkan tersebut sebenarnya adalahreaksi atas hegomoni 7 negara industri maju dunia yang mewakilikapitalis global seperti USA, Jerman, Inggris, Perancis, Kanada, Jepang, dan Italia, plussatu negara Russia. Delapan negara itu, yang kita kenal kemudian sebagai G8.

¹² Paling tidak mengacu pada rekomendasi Prof. Holton dari FlindersUniversity, ada tiga thesis yang sering dikemukakan untuk memahami globalisasi adalah: 1. tesis homogenisasi (berakar pada tradisi diffusi-innovasi) 2. tesis polarisasi (berakar pada tradisi konflik), 3. tesis syncretization (yang dikembangkan dari tradisi pemikiran amalgamasi oleh ilmuwan antropologi)

¹³ Kontroversiseputarglobalisasikebudayaancukupmenarik paling tidak menyimakrekaciptaMichael Porter dalam satu judul bukunya "Attitude, Values, Belief and the Micro Economics of Prosperity." mengembangkan konsep *competitive advantage*-nya itu dalam hubungan dengan kebudayaan. Ia mengembangkan buah

Stiglitz¹⁶ sangat yakin bahwa sedang membangun sebuah dunia yang lebih baik. Sebuah dunia dengan proses globalisasi yang memberikan keadilan manfaat bagi kelompok kaya dan miskin dalam generasi sekarang dan masa depan. Namun perlu reformasi terhadap globalisasi (Stiglitz 2007).

Globalisasi dan Kapitalisme. Konsep globalisasi sering dipersamakan dengan kapitalisme. Hal ini tidak dapat disalahkan, mengingat proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme seperti menglobalnya peran pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Persamaan mendasar keduanya adalah dalam rangka perluasan pasar, kemungkinan penggunaan tenaga kerja murah dan pengerukan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber alam dan sumber manusia dari negara lain. Hingga saat ini paling tidak proses kapitalisme masih *exist* keberadaannya melalui kontroversi Bank Dunia dan IMF yang mendapat julukan sebagai *the new colonial masters*. Meski hujatan terus mengalir, terutama ditujukan pada kegagalan propagandanya pada Dunia Ketiga yang mengatakan bahwa pasar bebas dan *economic orthodoxy* mampu mengatasi kemiskinan dan menjaga ekologi ternyata tidak terbukti¹⁷.

Kejayaan sistem kapitalis ditandai dengan mengejalanya arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang ada seperti sekarang ini¹⁸.

Yustika (tanpa tahun) dalam artikelnya bertajuk G4, WTO, dan Siasat Liberalisasi)

¹⁶ Joseph E. Stiglitz adalah pemenang Nobel ekonomi pada tahun 2001 dengan karya n teknik *screening* ke dalam teori asimetri informasi inilah yang membuatnya meraih penghargaan Nobel bersama-sama George Akerlof dan A. Michael Spence. Karya lainnya berjudul *Globalization and Its Discontents*, didalamnya ia menegaskan bahwa International Monetary Fund meletakkan kepentingan pemegang saham terbesar (Amerika Serikat) di atas kepentingan negara-negara miskin yang justru seharusnya ia bantu. Dalam buku ini Stiglitz juga menawarkan beberapa alasan mengapa globalisasi telah menimbulkan kemarahan para pemrotes, seperti yang terjadi di Seattle dan Genoa.

¹⁷ Cermati statement pada 'Deklarasi Madrid' dimana pada sidang forum alternatif yang dicetuskan diluar peringatan Ulah ke-50 Bank Dunia di Madrid 1994, deklarasi ini mengecam paradigma pertumbuhan dan ideologis pasar bebas dari Bank Dunia dan IMF dengan salah satu pelopornya Susan George direktur Transformation Instutuion Amsterdam.

¹⁸ Globalisasi yang dimaksud adalah globalisasi kapitalisme yang sedang berproses seperti sekarang ini, dimana ia berintegrasi dengan sistem ekonomi dunia yang sedang berlaku yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Meski sebenarnya globalisasi baru

Pendukung kapitalisme dengan ponggah memproklamkan bahwa ideologi ekonomi liberalisme dan kapitalisme mampu membawa kejayaan masyarakat ekonomi. Meski mereka menutup rapat-rapat praktek-praktek imperialisme dan kolonialisme yang mereka lakukan. Dengan jargon globalisasi mereka mengurita di negara-negara sedang berkembang melalui korporasi-korporasinya. Ada ungkapan sinisme yang harus kita mencermati yaitu istilah dari ekonom Jerman, Friedrich List (1789-1846) yakni istilah '*menandang tangga*'¹⁹ dimana merefleksikan siasat proteksi 'industri bayi' (*infant industry*) yang dipakai Inggris dan AS dalam membangun ekonomi mereka. Setelah mencapai puncak, mereka melarang negara-negara lain menerapkan strategi yang dahulu mereka pakai untuk maju (Priyono, 2004). Kapitalisme cenderung memberi ruang istimewa kepada pemilik modal berskala besar. Kelompok ini berusaha mencari lahan investasi yang paling menguntungkan di seluruh penjuru dunia. Meski sebenarnya dalam mengembangkan usahanya sebagian besar mendasarkan usahanya pada kegiatan yang bersifat spekulasi.

Sementara konsep globalisasi disama artikan dengan tatanan yang penuh modernitas, pola kemajuan yang eksplisit dan kemakmuran ekonomi sebagai jalan keluar kemacetan pertumbuhan ekonomi dunia ini. Globalisasi terkait erat dengan investasi dan alih teknologi. Globalisasi lebih bermakna multi dimensional ketimbang kapitalisme. Ia lebih "bertenaga" melalui kokohnya sistem yang terbangun seperti kapital dan sumber daya

menjadi perdebatan ketika ia dipandang sebagai resep (*prescription*) dari masalah dunia (Veltmeyer, 2001). Globalisasi terkait erat dengan investasi dan alih teknologi. Globalisasi lebih bermakna multi dimensional ketimbang kapitalisme. Ia lebih "bertenaga" melalui kokohnya sistem yang terbangun seperti kapital dan sumber daya manusia yang merata diseluruh dunia. Jadi tidak salah seringkali dibarengi juga oleh distorsi terhadap pranata sosial dan politik dan prasarana kebudayaan yang berakibat pada bangkrutnya perusahaan dan petani lokal yang tidak mampu bersaing di pasar internasional. Ikuti juga nada sinis dari Joseph Stiglitz dalam bukunya *Globalization and Its Discontents*: "But there is not just one market model..."

¹⁹ 'Tandang tangga'; yang dahulu ia pakai memanjat, agar pihak lain tidak bisa mengejanya. Lalu ia berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain tentang keuntungan dan keutamaan perdagangan bebas, sambil berlagak menyesal bahwa selama menerapkan strategi proteksi, ia ada di jalan yang salah. Lalu ia berkhotbah bahwa kini, dengan menempuh perdagangan bebas, untuk pertama kalinya ia menemukan kebenaran". (Friedrich List, *The National System of Political Economy* (trans. Sampson Lloyd), London: Longman, Green & Co, [1841] 1885, hlm 99 dalam Priyono, 2004.

manusia yang merata diseluruh dunia. Jadi tidak salah seringkali dibarengi juga oleh distorsi terhadap pranata sosial dan politik dan prasarana kebudayaan yang berakibat pada bangkrutnya perusahaan dan petani lokal yang tidak mampu bersaing di pasar internasional.

Meski demikian jika ditinjau dari sudut pandang historis perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan fase perjalanan panjang kapitalisme²⁰ liberal, yang secara teoritis dikembangkan oleh Adam Smith²¹. Propoganda globalisasi adalah janji akan adanya pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semuanya.

Banyak pihak masih mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam globalisasi, baik kesiapan pemerintah, produsen maupun konsumen. Padahal seperti banyak di ungkap, ekonomi Indonesia masih mengalami kelemahan pada fundamental ekonomi yang tidak langsung merupakan cerminan ketidakseimbangan eksternal dan internal. Dalam kondisi ini menapak ke era globalisasi dapat diartikan adalah sebagai ancaman globalisasi ekonomi terhadap ketahanan ekonomi nasional kita. Maka tidak dipungkiri diperlukan kebijakan ekonomi yang hadap masalah dengan memperhatikan perspektif waktu dan efektivitasnya.

Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi dunia maka kepentingan nasional harus dikedepankan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tangguh dan sadar kedaulatan (*sovereignty*). Kedepan diperlukan kebijakan ekonomi di tingkat makro dan mikro yang jelas dan transparan. Negara melalui pemerintahnya mempunyai mandat sebagai katalisator dan stabilisator ekonomi. Karena selama ini disadari bahwa terdapat

²⁰ Beberapa tahun terakhir pers gencar membicarakan fenomena baru yaitu gerakan "anti-kapitalisme" internasional. Istilah ini muncul untuk pertama kalinya di Inggris. Makna kata "anti-kapitalisme" bukan sama dengan sosialisme.

²¹ Membicarakan teori Adam Smith sering kali diarahkan pula pada debat panjang Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Globalisasi. Meski sejujurnya dunia 'bayangan' Adam Smith adalah dunia yang indah dan adil yang selalu memunculkan capaian keseimbangan melalui mekanisme pasarnya. Namun sayangnya kondisi itu tidak pernah hadir dalam realitas dan tidak akan pernah hadir. Sri Edi Swasono (1997) mempertegas jalannya teori Adam Smith selama ini berhasil mendikte manusia abad ini untuk terus bermimpi tentang kehadiran pasar sempurna. Lalu lahirlah berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi baik nasional maupun global berdasar teori pasar bebas dengan persaingan sempurna.

pola asimetri yang tampak jelas antara kebijakan dan implemetasinya. Hambatan terbesar adalah karena kebijakan ekonomi yang diintrodusir pemerintah masih pekat akan pola paternalisme yang berbarengan dengan menguritanya sistem-sistem dan struktur lama. Ambil contoh, jika kita amati kebijakan pemerintah masih kurang mampu menghadirkan pelaku bisnis handal yang benar-benar teruji. Hal ini paling tidak juga tercermin dari rapuhnya mikro institusional yang kita miliki. Kondisi ini menunjukkan indikasi ketidakjelasan arah kebijakan yang ingin dituju. Belum lagi dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang menciptakan masyarakat berorientasi pasar ternyata menghadirkan masyarakat yang berpola laku konsumtif. Berpijak dari ini maka kebijakan pemerintah kedepan haruslah mampu untuk menekan laku konsumtif dimana konsumen sebagai korban. Misal saja kebijakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan konsumen terbanyak dengan melakukan kebijakan penarikan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dan impor. Atau mengintrodusir regulasi disektor perbankan dengan meningkatkan suku bunga tabungan. Hal ini dimaksudkan untuk meredam perilaku konsumtif masyarakat. Contoh lain adalah kebijakan di bidang lingkungan, jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berdimensi lingkungan bahaya lingkungan akan mengancam melalui dampak globalisasi yang mengusung perdagangan bebas melalui perluasan kemampuan kapasitas regenerasi dan absorbsinya dengan mengimpor kapasitas dari negara lain. Dengan tidak langsung ini bermakna bahwa suatu negara dapat memutuskan menghindari skala ekologis melalui perdagangan dan dapat bergantung pada negara lain yang berkemampuan untuk mengadopsikan skala di mana negara pengimpor mencoba menghindarkannya²².

Mencermatikenyataan ini secara garis besar maka kebijakan pemerintah harus diupayakan untuk melindungi ekonomi nasional demi kemakmuran rakyat. Harga dari suatu kebijakan yang tidak cermat melihat konstelasi global sangat mahal. Implikasi globalisasi yang juga harus dicermati adalah

²² Pelanggaran terhadap Konvensi Basel melalui perdagangan limbah patut diwaspadai, apabila dipandang merusak dan merugikan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan *Montreal Protocol* serta amandemen Wina melalui Keppres No 23 tanggal 13 Mei 1992.

tuntutan untuk mengedepankan aspek demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, *intellectual property rights* (IPR), dan standardisasi. Untuk itu agenda kebijakan pemerintah baik ekonomi dan non ekonomi tidak dapat lepas dari implikasi globalisasi diatas. Kait-mengkait rumitnya masalah tidak saja dapat diatasi dengan hanya diintrodusinya satu kebijakan ekonomi. Diperlukan pemahaman menyeluruhan terhadap konsekuensi yang muncul. Kebijakan pemerintah harus mampu untuk meredam memanaskan ekonomi nasional dan juga munculnya *high cost economy*. Untuk itu intervensi pemerintah masih dipandang perlu dalam melindungi aset nasional melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat *imperativ*, meski kebijakan konvensional fiskal dan moneter melalui intensif, subsidi dan proteksi juga masih diperlukan, sepanjang untuk melindungi entitas ekonomi lemah.

Fakta Konglomerasi. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia diksi konglomerasi terasa pekat hitam. Konglomerasi bisnis yang pelakunya disebut konglomerat biasanya diartikan sebagai pengusaha yang kaya raya dan besar. Biasanya juga berkonotasi jelek. Gie (1998) memaparkan bahwa arti konglomerat adalah banyak perusahaan yang beraneka ragam, yang dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok persekutuan usaha. Maka sebenarnya konglomerat lebih sebagai istilah yang netral, hanya menggambarkan sesuatu yang bebas nilai.

Data konglomerasi di Indonesia seakan sudah masuk kedalam semua lini. Mulai dari yang berbasis sektor primer hingga tersier. Bisnis pertanian sudah dikuasai oleh segelintir perusahaan asing dan swasta nasional. Bisnis keuangan menunjukkan laporan terakhir bahwa disinyalir sebanyak 31 konglomerasi menguasai 70 persen aset sektor keuangan Indonesia yang pada semester I-2014 berjumlah sekitar Rp 5.300 triliun. Konglomerasi keuangan adalah beberapa lembaga keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha karena keterkaitan pemegang saham pengendali dengan lini usaha. Ia juga bisa dipahami sebagai suatu kecenderungan umum korporasi, termasuk dalam industri keuangan, untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, penting untuk memastikan bahwa konglomerasi berjalan sesuai ketentuan. Pada titik ini maka pemaknaan pada tingkat praksis konglomerasi sungguh membahayakan perekonomian nasional. Bangkrutnya Lehman Brothers menjadi simbol bangkrutnya sistem

finansial modern dalam skala raksasa. Bisnis konglomerasi. d. Bisnis konglomerasi disektor finansial ini runtuh. Kasus melelehnya negara Islandia yang tenggelam Islandia yang tenggelam dalam dinginnya lautan *bubble economy* karena liberalisasi perbankan karena liberalisasi perbankan yang diterapkan, menjadi bukti gagalnya konglomerasi yang mengglobal. konglomerasi yang mengglobal.

Konsentrasi penguasaan aset ekonomi di tangan segentir orang di tangan segentir orang dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian kemakmuran bagi masyarakat kemakmuran bagi masyarakat (*social welfare loss*) dalam berbagai bentuk. Perilaku konglomerat. Perilaku konglomerat sebagai pemupuk rente ekonomi secara rakus jelas bertentangan dengan ideologi bertentangan dengan ideologi ekonomi kita yaitu kemakmuran yang merata (Arief, 2001). Merata (Arief, 2001). Ekonomi yang menggelembung disatu sisi dan kempis disisi lain dalam nisbah kempis disisi lain dalam nisbah yang tidak sebanding akan menampakkan bahwa kebijakan ekonomi bahwa kebijakan ekonomi ternyata membelah aset rakyat secara jelas, mereka diberi proporsi mereka diberi proporsi yang memadai dalam pembangunan ekonomi meski didasari adanya meski didasari adanya realitas bahwa kebijakan ekonomi cenderung diskriminatif dan adanya perimatif dan adanya perasaan sentimen terhadap pelaku ekonomi yang lebih memberi prioritas pada lebih memberi prioritas pada ekonomi skala besar.

Parahnya konglomerasi tidak lepas dari sistem ekonomi yang dianut sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, pun atas strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan ekonomi yang diterapkan. Seringkali konsentrasi ekonomi semakin meningkat di berbagai sektor meningkat di berbagai sektor industri atau usaha, sehingga struktur pasar pun mengarah pada bentuk mengarah pada bentuk oligopolistik atau monopolistik dan bersifat *enclave*. Secara historis dapat *enclave*. Secara historis dapat dirujuk ulang bahwa cikal bakal konglomerasi di Indonesia, entah dengan rasi di Indonesia, entah dengan dukungan pemerintah yang salah dalam berstrategi melalui kebijakannya berstrategi melalui kebijakannya atau faktor eksternal yang membentuknya. Paling tidak jika dibandingkan Paling tidak jika dibandingkan dengan konglomerasi bisnis kelompok *Chaebol* di Korea Selatan atau *Chaebol* di Korea Selatan atau *Sogoshosa* di Jepang, Indonesia tidak kalah mengguritanya. Perlahan mengguritanya. Perusahaan plat merah ataupun swasta yang terjebak menjadi raksasa namun menjadi raksasa namun keropos telah timbul tenggelam dalam jagad perekonomian Indonesia, terkonomian Indonesia, terutama di era Orde Baru. Pemicunya adalah penerapan resep deregulasi dan penerapan resep deregulasi dan liberalisasi membawa mutasi genetika bisnis yang tidak sepadan dan liberalisasi membawa mutasi genetika bisnis yang tidak sepadan dan sepemikiran dalam budaya ekonomi kerakyatan Indonesia. Kerakyatan Indonesia. Kenyataan ini terlihat dari terdesaknya entitas bisnis kecil di tanah air, meski kecil di tanah air, meski besar secara jumlah tapi kecil secara kualitas omzet dan akses. Konglomzet dan akses. Konglomerasi di Indonesia yang ditimbulkan karena langkah-langkah deregulasi di berbagai langkah-langkah deregulasi diberbagai bidang tidak disertai jaring pengaman ekonomi yang memadai. konomi yang memadai.

Dialektika hubungan ekonomi di Indonesia sejak jaman kolonial hingga tidak mengalami perubahan mendasar. Ekonomi rakyat masih ditempatkan pada posisi akhir dan dalam posisi yang tertindas sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi Indonesia. Akhirnya, konglomerasi, ekonomi rakyat, globalisasi, kapitalisme dan kebijakan ekonomi adalah semacam menata *puzzle* ekonomi yang menghantui setiap perekonomian dan siapapun regim yang berkuasa. Karena kita hidup di alam terbuka dan saling tergantung ada bahaya yang hanya bisa diperkecil tanpa bisa menghilangkannya. Menggunakan ide Kirchgassner (1994) bahwa proses ekonomi sama sekali belum mencerminkan apa yang disebut dengan "*constitutional economics*", yaitu ekonomi yang berdasarkan konstitusi, seperti lazimnya berlaku pada negara modern (Arief, 2001).

Penutup

Pemaknaan demokrasi ekonomi dan pembangunan di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan menyejahterakan masyarakatnya. Meski risikonya adalah kegagalan memadukan rasionalisme dengan populisme. Disini seni memadukan peran pemerintah untuk menjadi efektif dengan peran pemerintah yang representatif yang membawa marwah teknokrasi dengan demokrasinya adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Seakan dilema yang melekat dalam konteks demokrasi ekonomi dan implementasi pembangunan ekonomi yang tidak habis dicari hakikatnya.

Sepertinya juga tidaklah cukup mendiskusikan konsepsi ekonomi Kerakyatan menjadi formulasi generik yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat menuju kemakmuran dan pemerataan. Semua berpulang kepada manusia-manusianya. Baik pengambil keputusan maupun bukan. Kalau kita mau jujur, ekonomi sebagai 'ilmu' terjerembab pada pemahaman yang sangat sempit, ia membuat spesialisasi yang sangat *rigid*, dan begitu *easy going* terhadap disiplin ilmu lain. Sebagai contoh selama ini banyak ekonom yang bergelut di wilayah kelembagaan pasar (*market institution*) dan tidak peka terhadap perkembangan dunia luar yaitu kelembagaan non pasar (*non market institution*). Kaitannya dengan krisis ekonomi adalah begitu terjadi maka layaknya benang kusut yang sulit dicari akar permasalahannya.

Globalisasi dan dampaknya tidak dapat ditolak oleh masyarakat dunia. Ia adalah ancaman sekaligus tantangan. Kebudayaan kapitalistik

yang dipercepat dengan propaganda perdagangan bebas tidak dapat dibendung. Hal ini terutama disebabkan oleh kemajuan sistem komunikasi yang semakin canggih. Meski harus diakui bahwa arus globalisasi juga dinilai turut mempercepat pengaruh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam mendorong gelombang kelima perubahan ekonomi internasional yang sering disebut "ekonomi berbasis pengetahuan" (*knowledge-based economy*).

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi menuju Pemulihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arief, Sritua, 2001. *Indonesi Tanah Air Beta*. Surakarta: UMS Press.
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, peluang dan Kendala*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Baswir, 2001. *Sistem Ekonomi Kerakyatan, dalam St. Sularto, ed. (2001), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Boediono, 2010. *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?* Jakarta: KPG
- Bremmer, I. 2006. *The J- Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall*. New York: Simon and Schuster.
- Doering, Detmar, 1999. *Liberalisme*. Friedrich-Neumann-Stiftung Freedom Institute.
- Fakih. M, 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Edy Suandi. 2005. *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*: Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, Mohammad, 1954. *Kumpulan Karangan III*. Jakarta : Balai Pustaka
- Jacob. 2001. *Gelisah Dalam Ketidakterdayaan*, KR 20 April 2001.
- Mubyarto, 2002. "Ekonomi Rakyat Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat." Th. 1 No. 1 Maret 2002, didownload dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm.
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Prasetyantoko. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyantoko. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Priyono, B. 1995. *Forum*. 16 April 2001.

16 April 2001.

Jun 2001.

Soedjatmoko. 1995. *Forum*. 16 April 2001.

Stiglitz, 2001. *Dunia*. 16 April 2001.

Yustika, A. 1995. *Forum*. 16 April 2001.

Waluyo, S. 1995. *Forum*. 16 April 2001.

Salim, E. 1995. *Forum*. 16 April 2001.

16 April 2001.

16 April 2001.

16 April 2001.

- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge – Massachusetts. USA
- Prasetyantoko, A. 2009. *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Liberal*. Jakarta: Kompas Press.
- Prasetyantoko, A. 2010. *Ponzi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Press
- Priyono, B. Herry-Priyono, 2004, *Marginalisasi la Neoliberal*, paper dalam Forum Majalah *BASIS* & Perpustakaan Kolese Ignatius, Yogyakarta, 16 April 2004 - Dimuat dalam *Jurnal BASIS*, No. 05-06/Th. 53, Mei-Juni 2004, hlm. 12-23.
- Soedjatmoko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES
- Stiglitz, 2007. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Adil*. Jakarta: Mizan
- Yustika, Ahmad Erani, 2004, *Demokrasi Prasyarat Ekonomi?* Kompas, 15 September 2004.
- Waluyo, Sunario, 1979. *Pemikiran Tentang Ekonomi Pancasila, dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia
- Salim, Emil. 1966. *Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*, Jakarta: Gramedia

- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge – Massachusetts. USA
- Prasetyantoko, A. 2009. *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Liberal*. Jakarta: Kompas Press.
- Prasetyantoko, A. 2010. *Ponzi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Press
- Priyono, B. Herry-Priyono, 2004, Marginalisasi à la Neoliberal, paper dalam Forum Majalah BASIS & Perpustakaan Kolese Ignatius, Yogyakarta, 16 April 2004 - Dimuat dalam Jurnal BASIS, No. 05-06/Th. 53, Mei-Juni 2004, hlm. 12-23.
- Soedjatmoko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES
- Stiglitz, 2007. *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Adil*. Jakarta: Mizan
- Yustika, Ahmad Erani, 2004, *Demokrasi Prasyarat Ekonomi?* Kompas, 15 September 2004.
- Waluyo, Sunario, 1979. *Pemikiran Tentang Ekonomi Pancasila, dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia
- Salim, Emil. 1966. *Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*, Jakarta: Gramedia

Keberagaman (ke-Indonesiaan) bukan berarti semua menjadi *campur-baur* dan kehilangan jati diri. Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini memungkinkan—kalau bukan mengharuskan—masing-masing kelompok masyarakat memiliki kemampuan menjaga identitasnya masing-masing dan pada saat yang sama dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok masyarakat yang lain. Sebuah komitmen hidup berbangsa dan bernegara untuk membangun kesediaan sosial, politik, dan kultural, untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai sebagai saudara sebangsa (*ukhuwwah wathaniyyah*).

K.H. Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi,

mantan Ketua Umum PBNU dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.


Yudi Latif, Ph.D.,

Alumnus *Political Sociology* The Australian National University dan Penulis buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* dinobatkan sebagai salah satu dari 44 buku yang paling penting dalam Pembangunan Bangsa



PENERBIT OMBAK

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. 085105019945 / 082221483637; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com  Penerbit Ombak Dua



Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto
Universitas Jember Telp. (0331) 337422
Kode Pos 68121

ISBN 602-258-292-2



9 786022 582922